



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT RUMPUT LAUT TRIWULAN I

2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
DIREKTORAT RUMPUT LAUT
DIREKTORAT RUMPUT LAUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan I Tahun 2025 ini, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Rumput Laut selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Rumput Laut tahun 2025.

LKj Direktorat Rumput Laut triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja triwulan berikutnya pada tahun 2025 atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disajikan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, 17 April 2025
Direktur Rumput Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Nono Hartanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Permasalahan Utama.....	4
1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)	4
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya	6
2.2. Penetapan Kinerja	7
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut TW I Tahun 2025	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2. Analisis Kinerja	13
3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut.....	13
3.2.1.1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	13
3.2.1.2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - ' <i>Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i> '	14
3.2.1.3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat	17
3.2.1.4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB).....	18
3.2.1.5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	19

3.2.2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	22
3.2.2.1.	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut	22
3.2.2.2.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut.....	23
3.2.2.3.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut	24
3.2.2.4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut	25
3.2.2.5.	Persentase Layanan Perkantoran	25
3.2.2.6.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut	26
3.2.2.7.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut	27
BAB 4.	PENUTUP	28
4.1.	KESIMPULAN	28
4.2.	REKOMENDASI	28

DAFTAR TABEL

Tabel A.	Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Rumput Laut Tahun 2025.....	vi
Tabel 1.1.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	2
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 Direktorat Rumput Laut...	12
Tabel 3.2.	Capaian sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat triwulan 1 tahun 2025	14
Tabel 3.3.	Capaian Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - ' <i>Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i> ' triwulan 1 tahun 2025	16
Tabel 3.4.	Capaian Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat	18
Tabel 3.5.	Capaian Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya	19
Tabel 3.6.	Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	19
Tabel 3.7.	Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut	23
Tabel 3.8.	Capaian Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut ...	24
Tabel 3.9.	Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut	24
Tabel 3.10.	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut	25
Tabel 3.11.	Capaian Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut	26
Tabel 3.12.	Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut	27
Tabel 3.13.	Capaian Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	3
Gambar 2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024 .	6
Gambar 2.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024	7
Gambar 2.3.	Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025	9
Gambar 2.4.	Nilai Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	11
Gambar 3.1.	Target Bantuan KBRL Tahun 2025	14
Gambar 3.2.	Lokasi Kampung Lautra Budi Daya Rumput Laut.	16

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Rumput Laut triwulan 1 Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerja pada triwulan 1 Direktorat Rumput Laut mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,24 % dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 12 indikator kinerja dengan rincian seperti terlihat dalam Tabel A.

Tabel A. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 1	Capaian TW 1
SK.01	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut				
IKSK.01.1	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	Unit	170	0	0
IKSK.01.2	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'	Unit	1	0	0
IKSK.01.3	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat	Kg	37.500	100	2.520
IKSK.01.4	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB)	Unit	14	0	0
IKSK.01.5	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut	Rekomendasi Kebijakan	6	0	0
SK.02	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut				
IKSK.02.1	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut	Nilai	84	0	0
IKSK.02.2	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut	Indeks	81	0	0
IKSK.02.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut	Persen	100	0	0
IKSK.02.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut	Persen	85	85	89,19
IKSK.02.5	Persentase Layanan Perkantoran	Persen	80	80	100
IKSK.02.6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut	Nilai	80	0	0
IKSK.02.7	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut	Persen	65	0	0

Capaian indikator pada triwulan I tahun 2025 seperti terlihat tabel A menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Rumput Laut sangat baik karena indikator kinerja utama (IKU) yang periode perhitungannya triwulanan, capaiannya melebihi target. IKU tersebut yaitu: (1) Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut; dan (3) Persentase Layanan Perkantoran.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja, serta dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya, dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, tidak hanya semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam masing-masing kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Terkait dengan kebijakan tersebut Direktorat Rumpun Laut, berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui pemenuhan target dan sasaran Indikator

Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	1.	Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat (Unit)	170
		2.	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i> (Unit)	1
		3.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	37.500
		4.	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	14
		5.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	6.	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	81
		8.	Persentase penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	100
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (%)	85
		10.	Persentase Layanan Perkantoran (%)	80
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	80
		12.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (%)	65

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja (LKj) triwulan I tahun 2025 Direktorat Rumput Laut ini adalah sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pencapaian target IKU di triwulan berikutnya agar pencapaian target tahunan dapat terpenuhi secara sempurna.

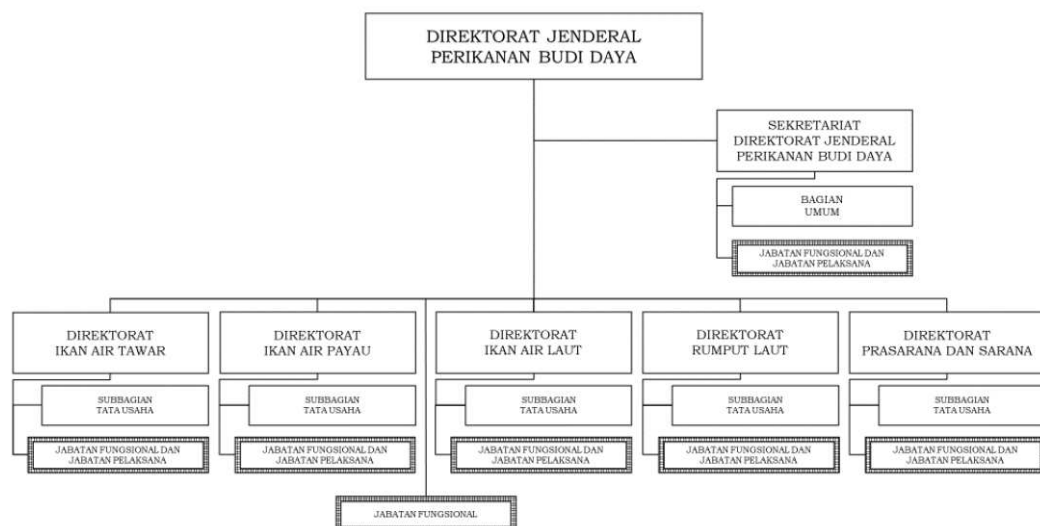
1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 165, Direktorat Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian

plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan Lingkungan pembudidayaan pada Komoditas rumput laut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan pada komoditas rumput laut;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, dan pengelolaan kesehatan dan Lingkungan pembudidayaan pada Komoditas rumput laut; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Rumput Laut.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

1.4. Permasalahan Utama

Secara umum permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam Kinerja Direktorat Rumput Laut terutama dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya adalah isu jaminan keamanan pangan produk yang menjadi tuntutan, baik pasar luar negeri maupun dalam negeri, sehingga pentingnya jaminan bagi pembudidaya rumput laut untuk menghasilkan bibit yang sehat dan bermutu melalui pembinaan CBIB dan sertifikasi CBIB.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan kinerja (LKJ) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada triwulan I tahun 2025. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Rumput Laut, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) triwulan 1 Tahun 2025 dengan target kinerja pada triwulan tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*), sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Rumput Laut termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai kebijakan pembangunan perikanan budi daya, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, serta penetapan kinerja Direktorat Rumput Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Rumput Laut serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya

Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi (1) Pengelolaan kawasan berkelanjutan, (2) Peningkatan produksi perikanan budi daya, dan (3) Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024

2.2. Penetapan Kinerja

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Rumput Laut telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Penetapan sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Rumput Laut Tahun 2025 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Direktorat Rumput Laut selama 1 (satu) tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja;
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025; dan
- c. Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya.

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja, maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai Perjanjian Kinerja antara Direktorat Rumput Laut dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025 seperti terlihat dalam gambar 2.3.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditiapb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT RUMPUT LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : **Direktur Rumput Laut**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT RUMPUT LAUT**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	170
	2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i> (Unit)	1
	3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	37.500
	4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	14
	5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut	6. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	84
	7. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	81
	8. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	100
	9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	85
	10. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80
	11. Nilai pengawasan kearsipan internal satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	80
	12. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (Persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	10.514.000.000
2.	Dukungan Manajerial	500.000.000
Total Anggaran Direktorat Rumput Laut Tahun 2025		11.014.000.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nono Hartanto

Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2025

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut TW I Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Rumput Laut dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rumput Laut dengan data pencapaian kerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Rumput Laut TW I Tahun 2025, menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id”;
5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” ditunjukkan dengan warna: (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

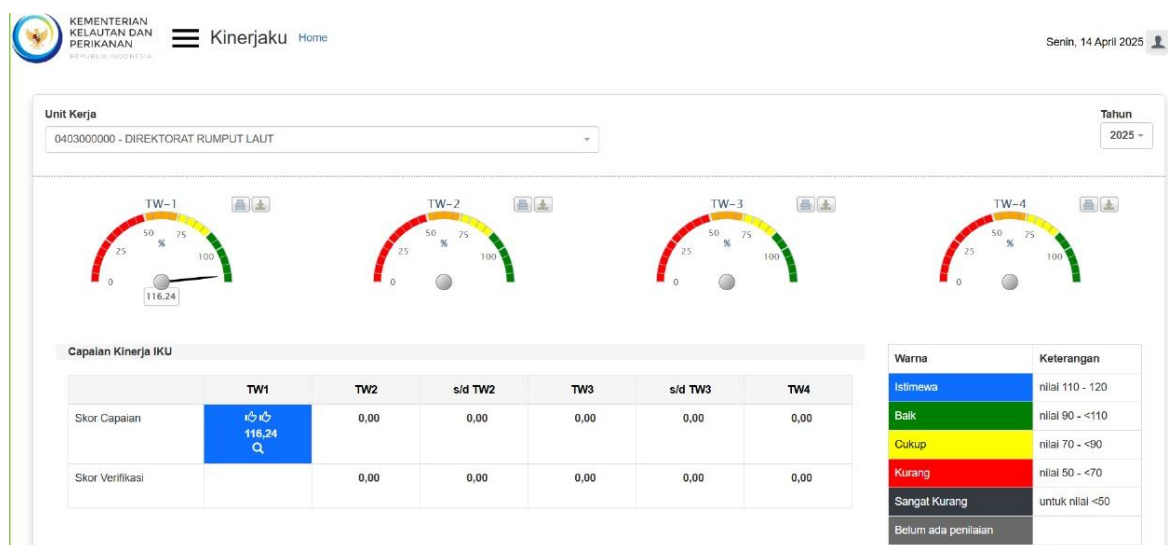
2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. Stabilize

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Kinerjaku", capaian NKO Direktorat Rumpuk Laut triwulan 1 tahun 2025 sebesar 116,24 seperti terlihat dalam gambar 2.4.



Gambar 2.4. Nilai Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Rumput Laut, yang menjadi indikator utama sebanyak 5 indikator dan 7 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 Direktorat Rumput Laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahunan 2025	TW I	
				TARGET	CAPAIAN
1	Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat (Unit)	unit	170	0	0
2	Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - <i>'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i> (Unit)	unit	1	0	0
3	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	kg	37.500	100	2.520
4	Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB) (Unit)	unit	14	0	0
5	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan)	rekomendasi kebijakan	6	0	0
6	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	nilai	84	0	0
7	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut (indeks)	indeks	81	0	0
8	Persentase penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	persen	100	0	0
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut (%)	persen	85	85	89,19
10	Persentase Layanan Perkantoran (%)	persen	80	80	100
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut (Nilai)	nilai	80	0	0
12	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut (%)	persen	65	0	0

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut

3.2.1.1. Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat

Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan budi daya yang menjadi salah satu andalan dalam peningkatan produksi, peningkatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Seiring dengan berkembangnya usaha budi daya rumput laut, maka diperlukan pengembangan bibit rumput laut, serta peningkatan kualitas bibit rumput laut.

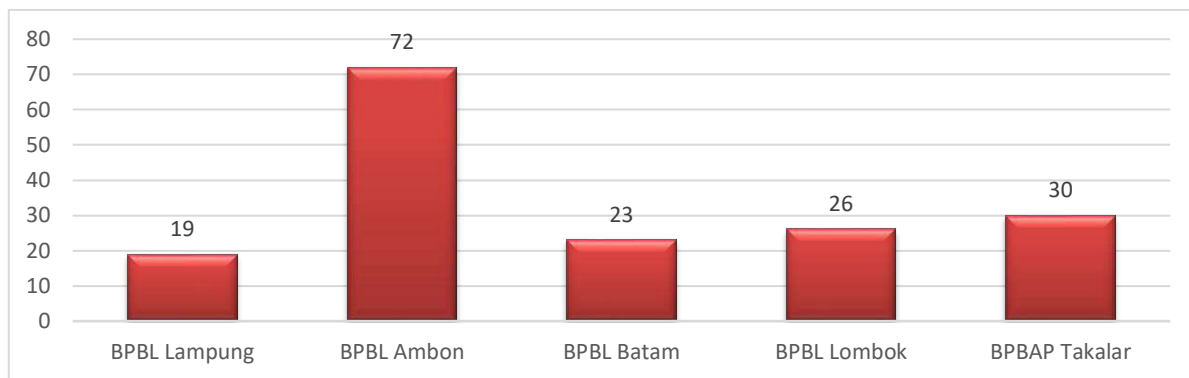
Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan khususnya untuk peningkatan produksi rumput laut, perlu adanya ketersediaan kebun bibit rumput laut (KBRL). Oleh karena itu, melalui program bantuan sarana budi daya rumput laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memberikan bantuan berupa KBRL pada kawasan tertentu di daerah pengembangan perikanan budi daya yang diutamakan berada di lokasi kampung perikanan budi daya rumput laut.

Tujuan pelaksanaan bantuan sarana budi daya rumput laut adalah untuk memenuhi kebutuhan bibit rumput laut yang berkualitas, serta meningkatkan produksi rumput laut.

Pelaksanaan bantuan KBRL berpedoman pada Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 298 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kebun Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025. Pemberi bantuan KBRL adalah DJPB yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup DJPB (BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBAP Takalar)

Penerima bantuan adalah kelompok yang dikategorikan menjadi: (a) Kelompok Masyarakat; (b) Kelompok Masyarakat Hukum Adat; (c) Lembaga Swadaya Masyarakat; (d) Lembaga Pendidikan; dan (e) Lembaga Keagamaan.

Total anggaran untuk kegiatan bantuan sarana budi daya rumput laut sebesar Rp. 9,35 miliar yang terdiri atas belanja perjalanan dinas (verifikasi/ CPCL/ BAST/ monitoring/ pengawasan), dan belanja fisik (sarana kebun bibit rumput laut (KBRL) kultur jaringan).



Sumber: RKAKL 2025 sebelum blokir

Gambar 3.1. Target Bantuan KBRL Tahun 2025

Total target bantuan sarana budi daya rumput laut tahun 2025 sebanyak 170 unit, dengan rincian per masing-masing UPT pelaksana seperti pada Gambar 3.1. Namun, pada triwulan I TA 2025 kegiatan tersebut belum terealisasi atau belum dilakukan penyaluran bantuan. Hal tersebut disebabkan karena UPT pelaksana belum menerima proposal permohonan bantuan, serta terjadinya pemblokiran anggaran yang menyebabkan perubahan alokasi anggaran dan target kegiatan.

Tabel 3.2. Capaian sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat triwulan 1 tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2025		TW I	Tahunan
-	-	170	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 3.2., periode perhitungan IKU sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah semesteran, sehingga pada triwulan I belum dilakukan perhitungan capaian. Selain itu juga, belum adanya terealisasinya bantuan KBRL disebabkan beberapa kendala, diantaranya: (a) Belum ada proposal permohonan bantuan KBRL yang diterima UPT pelaksana; (b) Pemblokiran anggaran yang menyebabkan perubahan alokasi anggaran dan target kegiatan; dsb.

3.2.1.2. Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - '*Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas*'

Laut sangat penting bagi kesejahteraan Indonesia melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti perikanan tangkap dan budi daya, wisata pantai, dan transportasi.

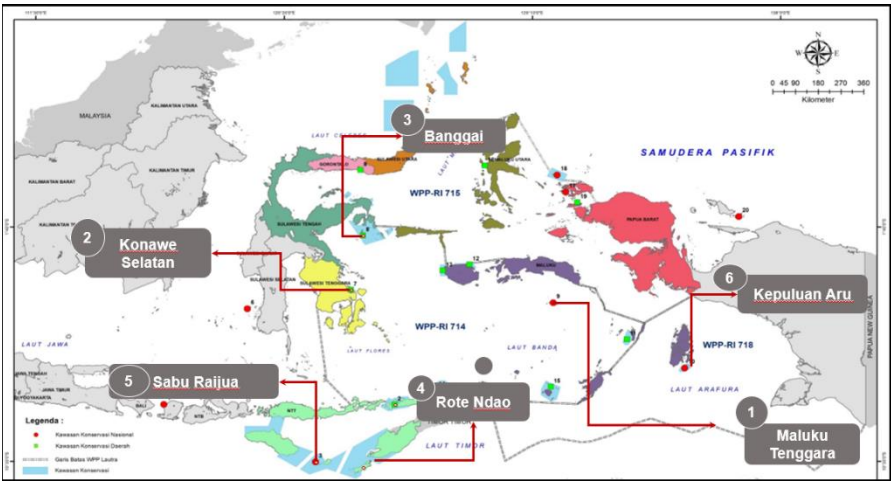
Indonesia merupakan produsen perikanan laut dan rumput laut terbesar kedua di dunia. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar USD 27 miliar terhadap perekonomian nasional dan menyediakan lebih dari tujuh juta lapangan pekerjaan dan setengah protein yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Peningkatan peluang ekonomi masyarakat yang berada di kawasan konservasi dilakukan melalui beberapa upaya kegiatan diantaranya melalui perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berada di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan konsep *Blue Economy* melalui program Lautan Sejahtera atau Lautra. *Alternative livelihood* sebagai bentuk peluang ekonomi dilakukan berbasis desa atau kampung yang berada di sekitar wilayah konservasi meliputi kegiatan usaha kelautan dan perikanan.

Komponen 2 *Oceans For Prosperity Project*-Lautan Sejahtera (Lautra): *Perluasan Peluang Ekonomi di Dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi* hadir sebagai upaya strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Program di dalam komponen 2 dirancang untuk memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat lokal dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan konservasi. Komponen ini berfokus pada pengembangan keterampilan masyarakat, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat lokal. Pelaksanaan Komponen 2 bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat lokal terhadap peluang ekonomi serta membangun ekosistem usaha yang inklusif dan ramah lingkungan melalui kegiatan usaha kelautan dan perikanan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut berbagai inisiatif, seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk lokal berbasis komunitas dan sumber daya hayati yang lestari, serta fasilitasi akses pasar dilakukan. Program ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai penjaga kawasan konservasi.

Kampung Lautra adalah suatu kawasan pesisir di dalam dan/ atau sekitar Kawasan Konservasi Laut berbasis peningkatan peluang ekonomi masyarakat lokal di sektor perikanan, pariwisata, dan budidaya perairan yang berkelanjutan untuk ketahanan pesisir dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi laut dan ekosistem serta perikanan terumbu karang. Pelaksanaan kegiatan Lautra berada di 11 provinsi yang terdiri dari 20 kawasan konservasi yang berada di 3 kawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yaitu WPPNRI 714, 715 dan 718. Pelaksana kegiatan ini adalah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut – DJPRL, Ditjen Perikanan Tangkap – DJPT, dan Ditjen Perikanan Budi Daya – DJPB) dan Kementerian PPN/Bappenas (Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam).

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) menetapkan usulan beberapa lokasi kampung Lautra yang beririsan dengan lokasi kampung perikanan budi daya rumput laut yang telah ditetapkan melalui Kepmen KP nomor 111 tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, yaitu Kabupaten Sabu Raijua (NTT), Kabupaten Rote Ndao (NTT), Kabupaten Konawe Selatan (Sultra), Kabupaten Banggai (Sulteng), Kabupaten Maluku Tenggara (Maluku), dan Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku).



Gambar 3.2. Lokasi Kampung Lautra Budi Daya Rumput Laut.

Penghitungan indikator kinerja Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut – Lautra ini adalah terlaksananya program-program kegiatan perikanan budi daya pada lokasi Kampung Lautra.

Tabel 3.3. Capaian Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas' triwulan 1 tahun 2025

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut <i>Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas</i>							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
		Target	Realisasi	Realisasi	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2025		TW I	Tahunan
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1					
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan, sehingga hasil pengukuran capaiannya belum dapat disajikan dalam tabel diatas. Pada tahun 2025 ini, pagu anggaran untuk kegiatan Lautra sebesar Rp. 10 miliar, yang terdiri dari beberapa komponen yaitu: (1) Pembangunan kampung rumput laut; (2) Akreditasi praktik

budidaya perikanan berkelanjutan (CBIB); (3) Kajian terkait sampah plastik di budidaya rumput laut (ALDAG); dan (4) *Capacity building* dan dukungan manajemen.

3.2.1.3. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat

Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan dan prioritas andalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan menjadi program yang dilaksanakan guna mendukung peningkatan produksi rumput laut nasional. Selain itu, program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan juga dapat meningkatkan kualitas rumput laut di masyarakat. Program bantuan ini dilatarbelakangi bahwa saat ini masyarakat masih menggunakan sumber bibit lokal yang merupakan bibit dengan generasi cukup lama sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas dan hasil produksi. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan bibit rumput laut yang berkualitas, tahan penyakit, cepat tumbuh dan selalu tersedia sepanjang musim. Oleh karena itu, kebutuhan bibit yang berkualitas sangat dibutuhkan pembudi daya, diantaranya dilakukan melalui teknologi kultur jaringan pada penyediaan bibit rumput laut. Bibit rumput laut hasil kultur jaringan ini memiliki keunggulan yaitu tumbuh lebih cepat dan memiliki ketahanan terhadap penyakit yang lebih tinggi. Bibit rumput laut kultur jaringan diproduksi di laboratorium dengan menghasilkan planlet yang merupakan individu baru hasil kultur jaringan.

Program bantuan ini dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. DJPB melalui unit pelaksana teknisnya telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan rumput laut di 6 (enam) UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, dan BPBL Ambon. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi dari UPT akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut.

Penghitungan indikator kinerja ini yaitu jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan program bantuan bibit rumput laut kultur jaringan adalah menstimulus kegiatan pembudidayaan rumput laut dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah pembudi daya rumput laut yang memenuhi persyaratan.

Perencanaan jumlah bibit yang akan disalurkan ke masyarakat di tahun 2025 sebanyak 37.500 kg dengan capaian pada triwulan 1 tahun 2025 yakni 2.520 kg. Kelompok penerima bantuan bibit rumput laut berlokasi di Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Lombok Timur, dan Kab Luwu Timur.

Tabel 3.4. Capaian Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024		TW I	Tahunan
-	26.300	37.500 kg	100 kg	2.520 kg	2.520%	6,72%	-	-	-

Perhitungan realisasi bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan, sehingga total capaian yang diperoleh yaitu 2.520 Kg atau 6,72% dari target tahun 2025.

Pagu anggaran kegiatan bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 2.625.000.000.

Rencana tindak lanjut triwulan II tahun 2025, adalah (i) Peningkatan produksi planlet, dan juga mikropopagul dan kalus yang merupakan tahapan-tahapan sebelum planlet; (ii) Percepatan CPCL; dan (iii) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan UPT.

3.2.1.4. Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB)

Setiap unit budi daya rumput laut diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip CBIB, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa rumput laut yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, pembinaan penerapan CBIB terhadap pembudi daya rumput laut perlu dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan tugas dan fungsi dalam kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sertifikasi CBIB yang semula ditangani oleh Ditjen Perikanan Budi Daya saat ini dilaksanakan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHKP) dan Ditjen Perikanan Budi Daya bertugas melakukan pembinaan kepada pembudidaya.

Pelaksanaan pembinaan penerapan CBIB diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 463 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Mutu Pembudidayaan Ikan. Pengukuran indikator kinerja yaitu jumlah kelompok pembudidaya rumput laut yang telah dilakukan pembinaan CBIB oleh Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.5. Capaian Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Unit Budi Daya Rumput Laut yang dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
		Realisasi		Target	Realisasi				
TW 1	Tahun 2024		Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024	TW I	Tahunan
-	-		14	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2025, Direktorat Rumput Laut memiliki target pembinaan penerapan CBIB terhadap 14 pembudi daya rumput laut. Adapun pada triwulan I ini belum ada realisasi untuk pembinaan CBIB dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

3.2.1.5. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut

Indikator kinerja ini adalah laporan penyusunan dokumen kebijakan tata kelola bidang budi daya rumput laut. Dokumen kebijakan ini antara lain berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau sering disebut NSPK. NSPK yaitu petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan, sehingga NSPK bidang budi daya rumput laut merupakan suatu petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dibidang budi daya rumput laut.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang budi daya rumput laut. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan budi daya rumput laut. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan bidang budi daya rumput laut. Sedangkan, kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan budi daya rumput laut.

Tabel 3.6. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut							
		Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Rumput Laut							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
		Realisasi		Target	Realisasi				
TW 1	Tahun 2024		Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024	TW I	Tahunan
-	-		6	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini mengukur jumlah dokumen kebijakan berupa penerbitan NSPK atau kebijakan-kebijakan lain terkait bidang budi daya rumput laut pada tahun 2025. Pengukuran IKU dilaksanakan di akhir tahun, namun perkembangan penyusunan dilaporkan setiap triwulan. Pada triwulan 1 ini masih belum terdapat realisasi dikarenakan semua dokumen masih dalam proses penyusunan dan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terdampak efisiensi anggaran. Adapun progres kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 1 yaitu:

1. Rancangan SNI Bidang Budi Daya Rumput Laut

Pada triwulan I telah dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8/KEP/BSN/1/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Program Nasional Perumusan Standar Guna mendukung pembahasan RSNI tersebut BSN telah menetapkan Keputusan Kepala BSN Nomor 37/KEP/BSN/2/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BSN Nomor 192/KEP/BSN/6/2021 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-07 Perikanan Budidaya dan Keputusan Kepala BSN No. 38/KEP/BSN/2/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis 65-07 Perikanan Budidaya.

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8/KEP/BSN/1/2025 di atas, pada tahun 2025, Direktorat Rumput Laut berencana untuk melakukan penyusunan 3 judul RSNI dengan judul sebagai berikut:

NO	JUDUL SNI	KONSEPTOR	INSTANSI	KET
1	Produksi Planlet <i>Kappaphycus alvarezii</i> hasil Kultur Jaringan rumput laut	Wiwien Mukti A, Dewi N. Febriani, Ahadta A. Rahma	BBPBAP Jepara)	Baru
2	Produksi mikropropagul <i>Kappaphycus alvarezii</i> hasil Kultur Jaringan rumput laut	Wiwien Mukti A, Dewi N. Febriani, Ahadta A. Rahma	BBPBAP Jepara)	Baru
3	Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Fatimah Sau dan Adang Sudjana	Direktorat Rumput Laut	Revisi

Namun dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pembahasan yang rencana akan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan April 2025 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran kegiatan pembahasan RSNI dialokasikan untuk kegiatan prioritas yang lain.

2. Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Prasarana Kegiatan Lautra

Program Insan Terang Lautra - Infrastruktur Terumbu Karang - Lautan Sejahtera (LAUTRA) bertujuan untuk membangun ekosistem usaha yang inklusif dan ramah lingkungan melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk lokal berbasis sumber daya hayati yang lestari, dan fasilitasi akses pasar. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pendekatan berbasis komunitas, program ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai penjaga kawasan konservasi. Pelaksanaan kegiatan LAUTRA di wilayah-wilayah konservasi dengan titik lokasi yang disebut dengan Kampung Lautra.

Kampung Lautra adalah adalah suatu kawasan pesisir di dalam dan/ atau sekitar Kawasan Konservasi Laut berbasis peningkatan peluang ekonomi masyarakat lokal di sektor usaha perikanan tangkap, perikanan budi daya dan jasa kelautan yang mencakup usaha garam dan wisata bahari untuk ketahanan pesisir dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi laut.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Lautra diantaranya adalah pemberian bantuan sarana dan prasarana budi daya rumput laut. Penghitungan indikator kinerja ini adalah terlaksananya program-program kegiatan dan tersalurkannya bantuan bidang budi daya rumput laut di lokasi Kampung Lautra. Oleh karena itu, penyusunan petunjuk teknis bantuan sarana prasarana kegiatan Lautra diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan bagi stakeholder dalam melaksanakan penyaluran bantuan.

Pada triwulan I ini kegiatan Lautra masih berupa pembahasan mekanisme pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya mekanisme penyaluran bantuan ke masyarakat berupa bantuan dana bergulir yang merupakan hal baru dalam kegiatan penyaluran bantuan dalam bentuk uang melalui PHLN dan dalam bentuk dana bergulir. Saat ini, penyusunan petunjuk teknis bantuan sarana prasarana kegiatan Lautra masih dalam proses penyusunan dengan penyesuaian berdasarkan mekanisme yang saat ini sedang disusun oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebagai koordinator dalam Proyek Lautra Komponen 2 di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Bahan Keragaan Kampung Perikanan Budi Daya Rumput Laut

Kampung Perikanan Budidaya adalah suatu Kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan menyinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta digerakkan oleh masyarakat sehingga mampu menjamin produksi yang kontinu dan terjadwal.

Berdasarkan Kepmen KP No 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya terdapat 41 Kampung Perikanan Budi Daya Rumput Laut. Guna mengetahui kondisi kampung perikanan budi daya rumput laut tersebut rencana akan disusun Bahan Keragaan Kampung Perikanan Budi Daya Rumput Laut yang diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan.

Pada triwulan I ini dalam proses penyusunan dan pengumpulan bahan yang akan ditampilkan dalam keragaan tersebut.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembudidayaan Rumput Laut

SOP Pembudidayaan Rumput Laut digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembudidayaan. Pada triwulan I ini telah disusun draft SOP Pembudidayaan Rumput Laut *Kappaphycus alvarezii* sesuai SNI 7673-2:2022 Produksi bibit rumput laut kotoni (*Kappaphycus alvarezii*), sakol (*Kappaphycus striatus*) dan spinosum (*Eucheuma spinosum*)—Bagian 2: Metode long-line.

3.2.2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut

3.2.2.1. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dengan mekanisme berdasarkan pada Permen PAN RB.

Tabel 3.7. Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Rumput Laut							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024		TW I	Tahunan
-	82,8	84	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan, maka hasil penilaian belum dapat disajikan. Namun rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Rumput Laut.

3.2.2.2. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Rumput Laut

Indikator kinerja ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua); c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga); e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan f. Pendidikan di bawah SLTA. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Tabel 3.8. Capaian Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut								
		Indeks Profesional ASN Satker Direktorat Rumput Laut							Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024			
Realisasi		Target		Realisasi						
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024		TW I	Tahunan	
-	89,46	87	-	-	-	-	-	-	-	

Capaian IP ASN TW 1 tahun 2025 belum dapat dihitung karena indikator kinerja ini merupakan indikator bersifat semesteran, sehingga pencapaiannya belum dapat diukur. Namun, berdasarkan rencana aksi untuk triwulan berikutnya, diharapkan Direktorat Rumput Laut menghimbau kepada seluruh PNS agar meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar, pelatihan secara *online* maupun *offline*.

3.2.2.3. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Direktorat Rumput Laut

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut merupakan penilaian terhadap temuan BPK terhadap Direktorat Rumput Laut yang telah tuntas diselesaikan oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.9. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024		TW I	Tahunan
-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-

Pada TW1 1 tahun 2025 capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Rumput Laut belum dapat disajikan karena Indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan.

3.2.2.4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Rumput Laut yang tindak lanjutnya dari Direktorat Rumput Laut telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Rumput Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.10. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024		TW I	Tahunan
90%	80%	85%	85%	89,19%	104.93	104.93	116.59	85	85

Pada TW 1 tahun 2025 capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Rumput Laut sebesar 89,19%. Apabila dibandingkan dengan TW 1 tahun 2024, pencapaian target Direktorat Rumput Laut menunjukkan hasil yang sedikit lebih rendah yaitu pencapaian TW 1 tahun 2024 adalah sebesar 90%. Rekomendasi atas rencana aksi TW 1 tahun 2025, Direktorat Rumput Laut agar meningkatkan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua kegiatan dalam administrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akuntabel.

Rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah penyelesaian hasil pengawasan lebih dioptimalkan pada TW 2.

3.2.2.5. Persentase Layanan Perkantoran

Persentase layanan perkantoran direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang dilaksanakan di Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.11. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024		TW I	Tahunan
100%	100%	80%	80%	100%	125	125	100	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaksanaan layanan perkantoran TW 1 tahun 2025 seperti tertera dalam tabel 3.11., realisasi mencapai 100 atau sekitar 125 persen dari target 80 yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Rumput Laut terutama terkait pelayanan perkantoran seperti pelayanan persuratan dan layanan rapat yang dilakukan secara offline semuanya telah tuntas dilakukan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian TW 1 tahun 2025 sama dengan capaian pada TW 1 tahun 2024.

Rencana aksi atas capaian triwulan berikutnya adalah mempertahankan hasil maksimal untuk capaian pada TW 2.

3.2.2.6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut

Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan audit kearsipan yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.12. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024		TW I	Tahunan
-	79,75	80	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker Direktorat Rumput Laut pada TW 1 tahun 2025 belum dapat diukur karena indikator ini bersifat tahunan sehingga belum dapat dijadikan pembandingan atas keberhasilan pada tahun sebelumnya. Namun demikian, agar target kegiatan ini tercapai di akhir tahun, Direktorat Rumput Laut berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

3.2.2.7. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya berdasarkan pada pelaksanaan penyelesaian SOP oleh Direktorat Rumput laut.

Tabel 3.13. Capaian Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut

Sasaran Kegiatan IKU 2025		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Rumput Laut							
		Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut							
		2025			% Capaian		% perbandingan dengan tahun 2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
		Target		Realisasi					
TW 1	Tahun 2024	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2025	Thd target tahun 2024		TW I	Tahunan
-	-	65	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kegiatan Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang sifatnya tahunan, sehingga capaian pada TW 1 belum dapat diukur.

Selain itu, indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB 4. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut triwulan 1 tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala terhadap capaian strategis Direktorat Rumput Laut.
2. Secara umum, Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Direktorat Rumput Laut yang diperjanjikan pada triwulan 1 tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sangat baik dengan nilai 116,24. Indikator kinerja utama (IKU) yang periode perhitungannya triwulanan, capaiannya melebihi target, yaitu: (1) Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker Direktorat Rumput Laut; dan (3) Persentase Layanan Perkantoran.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja triwulan 1 Direktorat Rumput Laut tahun 2025 sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perlu mempertahankan target - target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan.
2. Direktorat Rumput Laut akan memantau dan berkoordinasi dengan bagian Program DJPB kemungkinan penyesuaian target apabila terjadi perubahan anggaran.
3. Apabila terjadi perubahan alokasi anggaran dan target kegiatan, akan disesuaikan pada triwulan berikutnya.